

ANALISIS TENTANG BAGAIMANA KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN MEMPENGARUHI MIGRASI DAN INTEGRASI SOSIAL, SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN TERSEBUT BAGI MASYARAKAT

**Lara Juita¹, Emilia Susanti², Rista Yuliana³, Khonsa Mukhlisa⁴, Reyhandy Imanda⁵,
Gehan Farhan⁶**

larajuita17@gmail.com¹, ristayuliana462@gmail.com³, khonsamukhlisa12@gmail.com⁴,
handyyndyy@gmail.com⁵, gehanfarhan19@gmail.com⁶

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

penelitian ini menganalisis dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap migrasi dan integrasi sosial di Indonesia dan berbagai negara. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, jurnal ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan kewarganegaraan yang inklusif maupun eksklusif mempengaruhi pola migrasi dan proses integrasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat, baik dalam hal konteks kohesi sosial maupun ketidaksetaraan.

Kata Kunci: kebijaksanaan, migrasi, dan integrasi sosial.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah konsep fundamental yang menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Migrasi internasional merupakan salah satu isu global yang hangat untuk didiskusikan dan mendapatkan perhatian serius oleh stakeholders karena konsekuensi negatif yang ditimbulkan. Migrasi internasional didefinisikan sebagai sebuah bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas – batas wilayah negara dan budaya. Kebijakan kewarganegaraan sering kali menjadi instrument penting dalam mengatur migrasi dan integrasi sosial. Kebijakan migrasi merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sosial dan politik suatu negara. Migrasi, baik itu dalam bentuk migrasi maupun emigrasi, telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat, kebijakan migrasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap integrasi sosial, yaitu proses sosial dimana individu atau kelompok yang berbeda secara budaya, etnis, atau agama berinteraksi dan membentuk kesatuan sosial yang lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan kewarganegaraan mempengaruhi kedua fenomena tersebut dan implikasinya bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pembuat kebijakan, serta survei terhadap migran di Indonesia dan beberapa negara. Studi kasus mencakup negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan yang berbeda, seperti Jerman, Kanada, dan Jepang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

▪ Kebijakan Kewarganegaraan dan Migrasi

- Indonesia: kebijakan kewarganegaraan cenderung mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal (single citizenship). Ini berarti bahwa Indonesia pada umumnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warganya. Undang – undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa seseorang menjadi warga negara Indonesia harus meninggalkan kewarganegaraan lain yang mereka miliki.

Namun, ada pengecualian tertentu, terutama bagi anak – anak yang lahir dari pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga asing.

- Jerman: kebijakan kewarganegaraan yang lebih ketat di Jerman cenderung menghambat migrasi, terutama bagi individu dari negara non-Eropa. Dampak ini terlihat pada penurunan jumlah imigran dan peningkatan migrasi ilegal.
- Kanada: sebaliknya, kebijakan kewarganegaraan yang inklusif di Kanada menarik banyak migran, baik untuk tujuan kerja maupun Pendidikan. Kebijakan ini mendorong migrasi legal dan menurunkan angka migrasi ilegal.

▪ Kebijakan kewarganegaraan dan Integrasi sosial

- Indonesia: kebijakan kewarganegaraan dan integrasi sosial di Indonesia berfokus pada beberapa aspek utama yang dirancang untuk menjaga kesatuan nasional, mengelola keragaman, dan memastikan inklusivitas sosial.
- Jerman: kebijakan integrasi di Jerman berfokus pada asimilasi budaya kadang – kadang menciptakan hambatan bagi integrasi sosial. Migrasi sering kali merasa terpinggirkan dan sulit beradaptasi.
- Kanada: kebijakan multiculturalisme di Kanada memfasilitasi integrasi sosial dengan baik. Migran dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara.

▪ Implikasi Kebijakan bagi Masyarakat

- Kohesi Sosial: Kebijakan kewarganegaraan yang inklusif cenderung meningkatkan kohesi sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih menerima toleran.
- Ketidak Setaraan: kebijakan yang eksklusif dapat meningkatkan ketidak setaraan dan ketegangan sosial, terutama jika ada diskriminasi sistematis terhadap kelompok kelompok migran tertentu.

KESIMPULAN

Kebijakan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap migrasi dan integrasi sosial. Negara – negara dengan kebijakan yang inklusif cenderung lebih berhasil dalam mengelola migrasi dan mencapai integrasi sosial yang harmonis.

Sebaliknya, kebijakan yang eksklusif dapat menghambat proses ini dan menciptakan ketidak setaraan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kewarganegaraan yang mempertimbangkan inklusivitas dan keadilan sosial sangat penting untuk mencapai masyarakat yang kohesif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Castles, S., & Miller, M.J. (2013). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Theory of minority Rights*. Oxford University Press.

Bloemraad, I. (2006). *Becoming a Citizen: Incorporating Immigrants and Refugees in the United States and Canada*. University of California Press.

Jurnal

Lucas Wattimena, *jurnal penelitian Arkeologi Papua dan Papua barat* 2 (2) ,25-35, 2010

Shafira Evely Azzahra, Raski Musyafa, Muhammad Dimas Furqon, *UNES Law Review* Buku yang di tulis satu orang

Dr. Rahmad Budi Suharto, 2020. *Teori pendudukan*, RV Pustaka Horizon: samarinda Kalimantan Timur

Buku yang di tulis satu orang

A A I N Marhaeni, 2018. *Pengantar kependudukan*, fakultas ekonomi dan bisnis universitas udayana, CV. Sastra utama: Denpasar